

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berkembang pesat di dunia, terutama sejak runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989. Demokrasi lebih dari sekedar sebuah institusi dari pemerintah tertentu, melainkan ia memiliki sandaran kelompok nilai, praktik, dan sikap yang kuat sehingga dapat mewakili berbagai ekspresi dan bentuk di antara budaya dan masyarakat dunia yang beragam. Demokrasi sendiri menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak individu sehingga dapat membuka peluang partisipasi warga negara. Menurut David Held bahwa demokrasi adalah satu-satunya tatanan global yang memiliki banyak catatan kelebihan dibanding sistem pemerintahan lainnya. Sejauh ini, demokrasi yang digunakan sebagai strategi dalam proses politik modern adalah sistem politik terbaik (Rendy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho D. 2009).

Dari beberapa tipe demokrasi secara teoritis, demokrasi liberal merupakan demokrasi yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Ferran Requejo dalam lembar kerjanya menyatakan bahwa demokrasi liberal adalah sebuah alternatif untuk membangun sebuah politik demokrasi yang benar (Requejo 1991). Demokrasi liberal sendiri menciptakan ruang partisipasi aktif dari warga negara baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpolitik. Jabatan politik dalam demokrasi liberal diperoleh dari proses pemilihan umum secara periodik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat hadir seiring tingkat kompetisi yang tinggi antar politisi. Selain itu, demokrasi liberal juga menjunjung tinggi adanya hak-hak individu sehingga prosedur hukum dan undang-undang diberlakukan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan demikian, tujuan utama dari demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan kerakyatan dapat mengakomodir kepentingan rakyat dengan keterlibatan rakyat secara penuh.

Kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan demokrasi antara lain budaya *trust*, desentralisasi ekonomi, tingkat ketimpangan (baik dari segi sosial, budaya, dan ekonomi) yang rendah, pemerintahan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan, serta adanya kerja sama, kompromi, dan kompetisi. Gisela Redondo dalam penelitiannya tentang *cooperativism* mengungkapkan bahwa faktor kepemimpinan juga dapat mendukung kekuatan prinsip-prinsip demokrasi serta kualitas kerja. Adanya kepercayaan (*trust*) dan dukungan dari masyarakat akan meningkatkan kualitas kepuasan terhadap kerja suatu organisasi. Kepemimpinan mengalir dari akar rumput yang mendukung demokrasi, dari berbagai latar belakang yang diberi peluang untuk berpartisipasi, dan profesionalitas yang dibangun oleh seorang pemimpin (Redondo-Sama 2020).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir gelombang populisme menyerang negara-negara demokrasi di dunia. Perkembangan kelompok populis ini tidak hanya disebabkan oleh isu keamanan seperti imigrasi atau isu ekonomi seperti krisis moneter, tetapi juga karena pandangan negatif masyarakat soal kelompok elite. Populisme modern telah ada sejak abad ke-19, namun pergerakan paling signifikan terjadi di kawasan Eropa. *The Guardian* mencatat publikasi artikel dengan pembahasan seputar ‘populism’ dan ‘populist’ pada tahun 1998 berjumlah sekitar 300 artikel. Kemudian pada tahun 2015 meningkat hingga 1000 artikel dan 2000 artikel pada tahun berikutnya. Populisme sebenarnya sudah berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi. Namun peningkatan aktivitas kelompok populis semakin meningkat selama 10 tahun terakhir. Populisme merupakan paham yang memecah kondisi masyarakat menjadi dua, yaitu ‘rakyat’ dan ‘elite’. Populisme hadir karena ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja elite. Secara sederhana Cass Mudde mengartikan kelompok populis sebagai ‘tuan rumah’, baik di sayap kanan maupun kiri (Rooduijn 2018).

Menurut artikel Caroline Paskarina dari Jurnal Bawaslu yang mengutip pendapat Inglehart dan Norris, populisme hadir karena dua alasan, adanya kesenjangan ekonomi dan pertentangan nilai-nilai budaya (Paskarina 2017). Adanya dominasi elit

kaum minoritas yang menguasai ekonomi politik membuat mayoritas seakan termarginalkan sehingga populis hadir sebagai reaksi penolakan. Sedangkan para elit yang berkuasa cenderung memasukkan identitas baru hasil modernisasi sehingga bertentangan dengan identitas lama dan nilai-nilai budaya mayoritas. Rakyat yang merupakan entitas lama jelas menolak keras kedua kondisi tersebut sehingga populisme lahir dari perjuangan kelompok mayoritas untuk mempertahankan identitas. Populisme juga menyuarakan kepentingan kelompok marginal yang terdampak persaingan ekonomi politik maupun budaya secara global.

Faktor ekonomi dan kesenjangan sosial benar-benar terjadi di Amerika Serikat. Salah satu gerakan populis di Amerika Serikat tampil terang-terangan pada tanggal 17 September 2011 di dekat distrik keuangan Wall Street, New York dengan sebuah protes. Para aktivis gerakan *Occupy Wall Street* atau yang lebih dikenal dengan *Occupy Movement*. Gerakan ini juga memiliki slogan, '*We are the 99%*' dengan maksud menunjukkan kemakmuran para penduduk Amerika Serikat hanya kurang dari 1% kekayaan elit politik. Isu yang disuarakan adalah kesenjangan sosial, ketamakan para pemilik modal, dan kemiskinan global. Berdasarkan jurnal yang disusun Arif Darmawan dengan mengutip penjelasan Calhoun, *Occupy Movement* merupakan bagian dari arus mobilisasi internasional yang terjadi juga di luar Amerika Serikat. Perkembangan gerakan populisme ini terjadi setelah masyarakat menyadari kegagalan elit yang menyebabkan krisis global tahun 2008 (Darmawan 2017).

Kebijakan pemimpin populis juga mempengaruhi kondisi demokrasi Amerika Serikat. Perubahan politik luar negeri AS dari era presiden satu dengan lainnya memiliki ciri khas yang berbeda, namun umumnya membawa slogan yang sama yaitu penguatan nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan buku berjudul "Interrogating Democracy in World Politics", disebutkan bahwa Tocqueville berpendapat bahwa demokrasi Amerika dapat mewakili hal-hal yang akan terjadi di masa depan, sebagaimana masih banyak orang-orang yang akan datang ke Amerika dan membentuk bangsa/negara mereka sendiri. Tocqueville juga menjelaskan bahwa demokrasi adalah hal yang

membuat Amerika tumbuh menjadi negara yang hebat, besar, eskpansif, dan ditakdirkan untuk menguasai benua bahkan pengaruhnya dirasakan secara global. Begitu pula dengan stabilitas demokrasi yang baik, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, penegakan HAM yang kuat, serta memperkecil peluang adanya peperangan (Lawson and Epstein 2019). Pada era Clinton, janji-janji terhadap penegakan nilai-nilai HAM tidak terpenuhi akibat kebijakannya yang agresif. Setelah apa yang terjadi pada era Bush maupun Clinton, Obama lebih mengedepankan diplomasi dalam pengambilan kebijakan. Pasca kepemimpinan Clinton, Obama memilih untuk mengembalikan citra AS sebagai pembawa perdamaian dan cenderung menarik diri dari politik internasional. Begitu pula soal promosi demokrasi yang tidak lagi menjadi fokus utama pemerintahan Obama (Poppe 2010).

Pada pemilihan umum presiden AS tahun 2016, penurunan demokrasi sudah terlihat secara jelas. Partisipasi masyarakat AS dalam pemilu di AS terus menurun. Sejak tahun 2010 para pemilih yang dikenal loyal kepada partai politik seharusnya berpihak kepada salah satu calon. Tetapi saat pemilu diselenggarakan, jumlah orang yang tidak memilih (golput) hampir mencapai 100 juta orang. Kemudian jumlah golput pada pemilu AS tahun 2016 naik sekitar 131 juta penduduk menurut situs berita Liputan 6. Sebelumnya Hillary Clinton mengantongi banyak suara dari beberapa negara bagian, sedangkan pada saat penghitungan suara terbukti Trump dapat mengalahkan Clinton. Menurut beberapa komentar, hal ini juga disebabkan banyaknya suara golput yang menciptakan peluang bagi Trump untuk terpilih.

Sebelum Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat (AS), tingkat demokrasi di Amerika sendiri telah menurun dari *full democracy* menjadi *flawed democracy*. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian indikator demokrasi dalam indeks demokrasi tahun 2016 yang diterbitkan *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Untuk pertama kalinya sejak EIU merekam indeks demokrasi di tahun 2006, Amerika Serikat yang semula mendapat nilai 8,22 dari nilai sempurna 10, turun di angka 7,98 pada tahun 2016 sehingga tidak masuk ke dalam kategori *full democracy* (Rueckert

2017). Kemudian penurunan demokrasi ini semakin terlihat pada tahun-tahun setelahnya yaitu tahun 2017 hingga 2019. Amerika Serikat pada tahun 2017 berada pada urutan ke-21 sejajar dengan Italia dan berada dibawah Korea Selatan pada kategori *flawed democracies*. Begitu juga pada tahun 2018 dan 2019, Amerika Serikat menempati urutan ke-25 dengan kategori demokrasi yang stagnan. Pada tahun 2018 AS jatuh dari peringkat global karena dinilai mendapat penurunan kepercayaan publik.

### **B. Rumusan masalah**

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu, **“Apa dampak kebijakan populis Presiden Donald Trump terhadap demokratisasi dalam negeri dan kebijakan promosi demokrasi yang selama ini menjadi ciri khas politik luar negeri Amerika Serikat?”**

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak-dampak negatif kepemimpinan populis Presiden Donald Trump terhadap demokrasi Amerika Serikat dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019).

### **D. Kerangka konseptual**

Agar pembaca memahami pembahasan pada penelitian ini, diperlukan penjelasan terhadap konsep sebagai kerangka pemikiran. Oleh sebab itu dalam mendeskripsikan analisa atas bentuk ancaman populisme terhadap demokrasi, konsep populisme yang memiliki berbagai definisi, jenis, dan hubungannya terhadap kepemimpinan atau pengambilan kebijakan.

#### **1. Pengertian populisme**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan populisme sebagai, “paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil,” (KBBI 2020). Dalam Ensiklopedia Demokrasi diartikan sebagai: “Sebuah gerakan politik yang menekankan pada kepentingan, ciri budaya, dan perasaan spontan masyarakat umum, sebagai lawan dari elit yang memiliki hak istimewa. Untuk legitimasi, gerakan

populis sering kali menarik minat masyarakat secara langsung – melalui pertemuan massa, referendum, atau bentuk demokrasi kerakyatan lainnya – tanpa banyak memperhatikan pengawasan dan keseimbangan atau hak-hak minoritas (Marc F. Plattner 2009). Jan-Werner Müller dalam karya-karyanya; “Menuju Teori Politik Populisme” dan “*What is Populism*” mendefinisikan populisme sebagai, “Bentuk eksklusif dari politik identitas yang cenderung mengancam konsep demokrasi.” Rezim populis selalu membenarkan perilakunya sendiri dan mengklaim bahwa mereka sedang mewakili rakyat demi kebaikan bersama. Politik populisme harus dikritik karena membahayakan demokrasi (Gökmen 2017).

Studi populisme cenderung lebih banyak memahami persoalan komparatif atas kasus-kasus global dengan penggunaan perspektif yang berbeda. Hal ini berimplikasi pada pendekatan dalam studi populisme sehingga terdapat tiga pendekatan untuk menjelaskannya, secara ideasional, organisasional (multikelas), atau diskursif. Menurut pendekatan ideasional Cas Mudde, populisme dapat dipahami sebagai sebuah ideologi yang beranggapan bahwa masyarakat telah dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu ‘elite yang korup’ versus ‘orang kebanyakan’. Dan Mudde menambahkan bahwa kelompok populis seakan menjadi *vox populi* (suara rakyat). Sebagai ideologi, populisme membagi masyarakat menjadi dua kelompok: “orang-orang” dan “orang lain” bagaikan sosok antagonis dan protagonis. Tiga unsur studinya adalah elite, rakyat, dan kehendak rakyat umum. Sedangkan menurut pendekatan organisasional (multikelas) berdasarkan ekonomi-politik struktural, Richard Robinson dan Vedi Hadiz menjelaskan secara strukturalis. Populis diartikan sebagai sebuah ekspresi politik yang mencerminkan integrasi antar-kelas yang asimetris, isinya adalah *like-minded people* dengan artikulasi kepentingan kolektif. Secara keseluruhan mengartikan populisme sebagai upaya perlawanan atas elite politik yang mendominasi dengan memobilisasi rakyat dalam proses demokrasi sebagai basis legitimasi politik (Margiansyah 2019).

## 2. Jenis-jenis populisme

Fissore (2013) membagi beberapa kategori populisme:

- a. *National populism*: Campuran antara nasionalisme dengan militerisme. Contohnya seperti Nazisme dan Fasisme.
- b. *Revolutionary populism*: Cenderung ke arah merah tetapi nasionalis dan otoriter. Pada abad ke-20 wujud nyatanya adalah Stalinisme dan, oposisinya, catrisme dan chavisme yang mengacu pada Presiden Venezuela Hugo Chavez.
- c. *Democratic populism*: Muncul pada akhir abad ke-19 dengan *American People's Party*, bersikap pluralis di dalam negeri, namun nasionalis dan isolasionis dalam kebijakan luar negeri. Basis dari partai rakyat ini adalah mayoritas petani di pedalaman Amerika serta musuh-musuhnya dalam kapitalisme industri. Contoh saat ini yaitu Presiden Donald Trump dengan slogan '*American First*'.
- d. *Tele populism*: Beberapa tahun terakhir, kemajuan sarana telekomunikasi massa telah menyapa masyarakat. *Tele populis* menjangkau masyarakat melalui media seperti televisi yang menyiarkan kampanye dan propaganda paham populisme, janji-janji untuk banyak orang, dan memanfaatkan teknologi untuk *website* yang mudah diakses (Germani 2019).

Selain jenis-jenis populisme diatas, populisme juga menjadi bagian dari partai politik. Hal ini terjadi sejak munculnya gelombang populisme yang memanfaatkan partai politik sebagai medium untuk melebarkan pengaruh. Terdapat dua faksionalisasi dalam partai politik secara umum, *left-wing* (sayap kanan) dan *right-wing* (sayap kiri). Samir Gandesha menjelaskan bahwa populisme kanan mencampurkan 'rakyat' dengan negara yang sedang memerangi musuh eksternalnya: pengungsi, terorisme Islam, Komisi Eropa, dll. Populisme kanan seringkali menarik kehendak umum dengan menghadirkan karisma pemimpinnya. Hal ini dapat mengancam hak individu maupun kelompok, karena bisa mengubah orang asing menjadi musuh yang meresahkan bahkan menakutkan. Sedangkan

populisme kiri memposisikan ‘rakyat’ ke dalam struktur sosial-ekonomi, dimana negara mencoba untuk menghalangi mereka dalam menentukan nasib sendiri. Hubungan populisme kiri dengan HAM erat kaitannya dengan pemikiran Marx dan sosialisme yang pernah ada. Namun baik populisme kanan maupun kiri dapat berubah menjadi otoriter (Simon Fraser University, CA and Gandesha 2018).

### **3. Dampak-dampak populisme**

Para akademisi telah menyinggung bagaimana dampak positif maupun negatif populisme terhadap demokrasi itu sendiri. Perdebatan masih saja terjadi antara kelompok pro dan kontra akan dampak populisme bagi demokrasi liberal. Jika menekan pada rakyat sebagai unsur utama dalam demokrasi liberal, ‘rakyat’ juga menjadi hal yang diangkat oleh kelompok populis. Untuk itu, sebelum lebih jauh mempelajari dampak-dampak negatif populisme di Amerika Serikat sendiri, terdapat dampak-dampak positif maupun negatif yang perlu dipahami.

Dampak positif yang dapat diberikan populisme terhadap rezim demokrasi liberal telah disimpulkan dalam artikel dari *London School of Economics*. Beberapa dampak yang dikutip dari penelitian Cass Mudded dan Rovira Kaltwasser, seperti populisme dapat memberikan ruang bagi kelompok yang merasa tidak terwakili oleh para elit, dengan menempatkan topik yang relevan kepada ‘*silent majority*’. Populisme dapat memobilisasi kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dengan cara meningkatkan integrasi politik mereka. Populisme juga mewakili kaum terpinggirkan dengan menerapkan kebijakan yang mereka inginkan. Populisme mampu menjadi jembatan ideologis yang mendukung pembangunan koalisi hubungan penting dalam sosial-politik, melintasi batas-batas kelas. Selain itu, populisme dapat meningkatkan akuntabilitas demokrasi, dengan menjadikan kebijakan-kebijakan serta isu-isu sebagai bagian dari ranah politik. Terakhir, populisme juga dapat mengebalikan dimensi politik atau istilahnya ‘demokratisasi demokrasi’ (Rovira Kaltwasser 2012).

Sementara itu, beberapa dampak negatif juga telah terangkum; populisme dapat menggunakan gagasan ‘kedaulatan rakyat’ untuk melanggar *check and balances*, menggunakan gagasan dan praksis kekuasaan mayoritas untuk menghindari hak minoritas, mendorong perpecahan politik baru sehingga menjadi penghalang bagi stabilitas politik. Populisme juga menyebabkan kesulitan konsensus sehingga mengganggu moralitas politik. Kemudian populisme dapat mendorong transformasi politik plebisiter sehingga merusak legitimasi lembaga politik dan badan yang tidak dipilih. Ironisnya, dengan mendukung kehidupan non-elit (orang-orang tanpa latar belakang politik) dalam perpolitikan, populisme semakin mempermudah penyusutan politik (Rovira Kaltwasser 2012).

#### **4. Hubungan populisme dengan kepemimpinan**

Pemimpin populis mengartikan rakyat secara sempit, merujuk pada identitas nasional yang anti-elitis. Hal ini berdampak pada kebijakan yang diambil, mereka hanya memprioritaskan kepuasan bagi para pendukung atau kelompoknya tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Rakyat yang diusung populis adalah sekumpulan orang-orang yang takut kehilangan statusnya dalam masyarakat. Populisme mengangkat isu-isu ancaman sosial-budaya dengan hadirnya pendatang, atau ancaman ekonomi-sosial sebagai dampak globalisasi. Ideologi populis bersifat tipis, sehingga mudah dikombinasikan dengan pemikiran kelompok kiri atau kanan. Hal ini juga yang menjadikan pemimpin populis di negara yang satu dengan lainnya berbeda, karena menyesuaikan dengan kepentingan kelompok mayoritasnya.

Deskripsi tentang populisme sendiri merupakan sebuah tantangan, karena faktanya populisme seringkali digunakan untuk menjelaskan gerakan politik, sejarah, ideologi, partai, pemimpin lintas geografis, dan konteks ideologis. Pinar DiNç dalam penelitiannya – mengutip Gildron dan Bonikowski (2013) menjelaskan tiga pendekatan sederhana untuk menjelaskan definisi populisme (DiNç 2016).

*Tabel 1.1 Tiga Pendekatan Populisme*

Populisme sebagai ideologi	Populisme sebagai wacana	Populisme sebagai strategi politik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi: Seperangkat gagasan yang saling terkait tentang politik dan masyarakat.</li> <li>• Unit analisis: Partai dan pemimpin partai.</li> <li>• Metode yang relevan: Analisis teks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi: Cara untuk membuat klaim tentang politik; karakteristik wacana.</li> <li>• Unit analisis: Teks, pidato, diskursus publik tentang politik.</li> <li>• Metode yang relevan: Analisis tekstual interpretatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi: Sebuah bentuk mobilisasi dan organisasi.</li> <li>• Unit analisis: Partai (berfokus pada struktur), gerakan sosial, pemimpin.</li> <li>• Analisis sejarah komparatif, studi kasus.</li> </ul>

Sumber: Diadaptasi dari DiNç, Pinar. (2016). “MAPPING POPULISM: DEFINITIONS, CASES, AND CHALLENGES TO DEMOCRACY.” Istanbul Policy Center, October, 18.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang paling relevan adalah populisme sebagai sebuah strategi politik. Unit analisisnya berupa seorang pemimpin populis, dengan metode studi kasus. Noam Gidron dan Bart Bonikowski mengutip dari Weyland memperkuat hubungan pemimpin dalam populisme dengan pernyataan,

“Populisme paling baik didefinisikan sebagai strategi politik yang mana seorang pemimpin secara personal mencari atau menjalankan kekuasaan pemerintah berdasarkan dukungan langsung, tanpa perantara, dan dukungan yang tidak dilembagakan dari pengikut dengan jumlah besar yang sebagian tidak terorganisir.” (Gidron and Bonikowski 2013).

Presiden Donald Trump merupakan pemimpin populis sayap kanan yang diusung Partai Republik, yang mana populisme kanan ini sangat berhati-terhadap pengaruh dari luar. Isu-isu yang menjadi fokus seperti terorisme Islam, migrasi, dan konspirasi Yahudi Internasional. Kebijakan atas isu-isu tersebut juga berkaitan dengan

HAM baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak heran jika kebijakan luar negeri AS di era Donald Trump menjadi isolasionis dengan kategori *democratic populism*. Oleh karena itu, pengaruh kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap demokrasi liberal AS sendiri.

Jika menelusuri politik AS sejak tahun 2017, kebijakan “American First” disuarakan Trump dalam pidato setelah pelantikannya. Kebijakan ini berlaku baik dalam maupun luar negeri, terutama kebijakan ekonomi dan keamanan (Saputri 2019). Hal ini tentu menyulitkan secara global karena negara-negara harus berhati-hati untuk menjaga hubungan diplomatik dengan AS. Begitu juga permasalahan Hak Azazi Manusia yang seharusnya dipromosikan juga oleh Amerika selaku promotor global demokrasi justru mengalami hambatan. Dalam kurun waktu 2017-2019, beberapa kebijakan luar negeri Donald Trump yang menjadi sorotan diantaranya adalah *travel ban*, meninggalkan *Paris Agreement*, perang dagang AS-China, pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel, sekaligus pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem. Menurut artikel dalam laman website organisasi analisis kebijakan luar negeri, *Carnegie Endowment for International Peace* menyebutkan bahwa AS saat ini sebagai promotor demokrasi justru menggerus gagasan orang tentang demokrasi itu sendiri akibat kekacauan politik, presiden yang tidak demokratis, serta lembaga pemerintah dan masyarakat yang masih harus belajar lagi tentang demokrasi.

Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa kepemimpinan populis Presiden Donald Trump sangat berpengaruh terhadap demokrasi Amerika Serikat. Penelitian Eatwell dan Goodwin kaum populis mempertanyakan eksistensi dan pengaruh adanya negara bangsa jika identitas mereka pada akhirnya harus dileburkan bersama suara minoritas sehingga kepentingan ‘orang kulit putih’ yang tertinggal diabaikan (Eatwell and Goodwin 2018). Namun Pippa Norris dalam lembar kerjanya menyatakan bahwa kepemimpinan autoritarianisme populis Presiden Donald Trump menimbulkan risiko terhadap nilai-nilai inti demokrasi, praktik, dan institusi demokrasi liberal AS (Norris 2017). Kemudian Robert C. Lieberman (dan beberapa peneliti

lainnya) meyakinkan bahwa populisme Trump yang sarat berhubungan dengan ras akan mengikis kepercayaan terhadap pemerintah (Lieberman et al. 2019). Sedangkan penelitian ini berbeda karena berisi tentang deksripsi dampak negatif kepemimpinan populis Presiden Donald Trump selama tahun 2017-2019 yang berpengaruh terhadap demokratisasi dalam negeri, legitimasi pemerintah, dan promosi demokrasi sebagai ciri khas politik luar negeri Amerika Serikat.

### **E. Hipotesa**

Berdasarkan penjabaran dari permasalahan diatas maka penulis merumuskan dugaan atas dampak kepemimpinan populis Presiden Donald Trump terhadap kemunduran demokrasi Amerika Serikat tahun 2017-2019 karena:

“Kepemimpinan populis Presiden Donald Trump di Amerika Serikat dalam tiga tahun (2017-2019) menyebabkan lemahnya demokratisasi dalam negeri, polarisasi masyarakat, penurunan legitimasi pemerintah, kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip HAM, serta berhentinya promosi demokrasi.”

### **F. Metode penelitian**

Metode dalam penulisan menggunakan metode kualitatif dengan *case study research*. Studi kasus yang digunakan yaitu kepemimpinan Presiden Donald Trump - yang dulunya merupakan calon presiden yang diusung partai Republik dan populis kelompok kanan - selama tiga tahun (2017-2019). Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, berita nasional maupun internasional, laporan tahunan, dan website. Prosedur penelitian didasarkan dari pemahaman terhadap konsep populisme seperti yang telah dijelaskan agar pembahasan tidak melebar dan sesuai dengan kerangka berpikir. Argumen pokok yang ingin penulis sampaikan adalah deskripsi tentang ancaman populisme terhadap demokrasi pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat tahun 2017-2019.

## **G. Jangkauan penelitian**

Agar penelitian sesuai dengan pembahasan yang dimaksud, maka dibutuhkan penjelasan tentang ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu penelitian ini hanya akan membahas pada rumusan masalah yang telah di uraikan dan untuk itu akan dibatasi pada:

1. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud merupakan nilai-nilai dalam demokrasi liberal Amerika Serikat. Demokrasi liberal ini menjunjung tinggi kebebasan, sehingga segala urusan mengenai hak individu tidak terbatas hanya pada kelompok sosial, gender, atau ras tertentu.
2. Konsep populisme dibatasi pada studi kasus kepemimpinan Presiden Donald Trump dari tahun 2017 hingga 2019. Presiden Donald Trump resmi dilantik sejak tahun 2017 sehingga menandai awal masa jabatan Presiden Donald Trump. Kemudian pada Juni 2019, Presiden Trump kembali mencalonkan diri sehingga pada akhir tahun 2019 masa-masa kampanye telah dimulai. Hal ini kemudian menjadi landasan penulis agar berfokus pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019) masa jabatan Presiden Trump saja, juga agar tidak tercampur dengan kepentingan kampanye.

## **H. Sistematika penulisan**

Penelitian dengan judul “Dampak Populisme terhadap Demokrasi: Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat Tahun 2017-2019” direncanakan terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah berupa uraian singkat mengenai demokrasi serta kehadiran populisme yang berdampak pada demokrasi itu sendiri. Setelah mengambil contoh dampak positif dan negatif populisme berkembang secara global, kemudian difokuskan pada studi kasus Amerika Serikat. Lalu dapat ditarik rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian. Dalam menjawab permasalahan tersebut, konsep populisme digunakan

sebagai landasan konseptual sehingga dapat memunculkan sebuah hipotesa. Selanjutnya pemaparan metode dan ruang lingkup penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II berisi pemaparan tentang kemunculan populisme di Amerika Serikat, masa-masa kampanye Presiden Donald Trump hingga resmi dilantik, dan dinamika demokrasi di Amerika Serikat pada tahun 2017-2019.

Bab III berisi penjelasan tentang dampak-dampak negatif kepemimpinan populis Presiden Donald Trump terhadap demokrasi Amerika Serikat tahun 2017-2019 berdasarkan hasil analisis kebijakan domestik selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump dari tahun 2017-2019.

Bab IV berisi tentang penjelasan kebijakan *muslim ban* dan berhentinya kebijakan luar negeri Amerika Serikat tahun 2017-2019 dalam promosi demokrasi.

Bab V memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan penulis dari bab I hingga bab IV berupa jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.